

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era persaingan yang sangat ketat seperti sekarang ini, reformasi terhadap pengelolaan keuangan dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dan dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 juga telah menjelaskan Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah daerah ini menggambarkan output atau hasil dari kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur sehingga dapat menjelaskan kinerja dan tanggungjawab pengelolaan anggaran keuangan selama periode tertentu. Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan untuk menginformasikan posisi keuangan perusahaan kepada

pihak-pihak yang berkepentingan atau para stakeholder. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Revisi 2009 Tahun 2012, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut IMF dalam Sudaryo (2017:46) menyebutkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan akan terwujud apabila: terdapat kejelasan tugas dan wewenang dalam struktur organisasi pemerintahan, ketersediaan sistem informasi bagi publik mengenai pemerintahan, sistem anggaran yang terbuka, dan adanya lembaga independen yang mengawasi seluruh proses pemerintahan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Pemerintah daerah wajib memperhatikan

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Pemerintah Daerah mempunyai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berupa proses mulai dari pencatatan sampai pelaporan aktivitas transaksi (Pasal 1, Permendagri 13/2006). SAKD menyediakan catatan yang lengkap mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana yang akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Pasal 5, PP 58/2008). SAKD yang dilaksanakan sesuai ketentuan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Defitri, 2018). Implementasi sistem yang baik tidak dapat tercapai dengan sukses apabila individu yang menjalankan sistem tersebut tidak mendukungnya (Pujanira dan Taman, 2017). Masalah kompetensi sumber daya manusia menjadi tantangan bagi setiap pegawai pemerintahan karena berdasarkan fenomena yang ditemui masih ada kesenjangan antara kompetensi sebagai syarat tugas pokok dengan kompetensi yang dimiliki, akibatnya pegawai kurang memahami tentang pengelolaan keuangan (Saifudin, 2017).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK), ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan BPK yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak

Memberi Pendapat (TMP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Pemerintah Daerah Kabupaten Badung berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pada tahun 2020. Raihan opini WTP ini merupakan prestasi kali keenam secara berturut-turut yang dicapai Pemkab Badung, hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Badung beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Sulyanto menyatakan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyusunan LHP Pemkab Badung Tahun 2019 telah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) berbasis akrual yang telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material. Selain itu, Pemkab Badung juga telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI (Sistem Pengendalian Intern) yakni: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Tabel 1.1
Perkembangan Opini Pemerintah Daerah Seluruh Kabupaten di
Provinsi Bali Tahun 2015-2020

| Entitas | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| Kab. Badung | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kab. Denpasar | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kab. Karangasem | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kab. Tabanan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kab. Gianyar | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kab. Klungkung | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kab. Buleleng | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kab. Jembrana | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kab. Bangli | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

Sumber : BPK Bali (2021)

Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008. Menurut Mulyadi menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Penerapan SPI mampu

meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi serta memudahkan proses audit laporan keuangan, semakin baik SPI pemerintahan maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

Dalam penelitian Kamusi (2019) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan Aida (2019) dalam penelitiannya juga menyatakan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dibidang pengelola keuangan. SDM harus memiliki kompetensi dibidang akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan agar laporan keuangan tersebut memiliki kualitas yang baik. Namun sudah jadi permasalahan umum yang terjadi di pemerintahan khususnya pemerintah daerah bahwa untuk menerapkan manajemen sumber daya manusia, seringkali yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga diharapkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan maka dibutuhkan bukan hanya jumlah sumber daya manusia melainkan kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia tersebut. Garung (2018) dan Sari (2020) dalam penelitiannya menyatakan kompetensi sumber daya

manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sumber daya manusia juga harus menguasai teknologi informasi (TI) demi mencapai tujuan organisasi. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Garung (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan penelitian yang dilakukan Sari (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan memiliki standar yang harus diterapkan yaitu: (1) standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas organisasi bagi pengguna informasi, (2) standar memberikan petunjuk dan

aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya, (3) standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya, (4) standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan ketidakkonsistenan pendapat dalam beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian kembali dengan mengambil judul **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung ?
- 2) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung ?
- 3) Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung ?

- 4) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai sarana informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

- 2) Manfaat Praktis :

- a) Bagi Mahasiswa

Untuk dapat meningkatkan, memperluas dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah secara teoritis dengan kenyataan selama melaksanakan penelitian, khususnya bagi

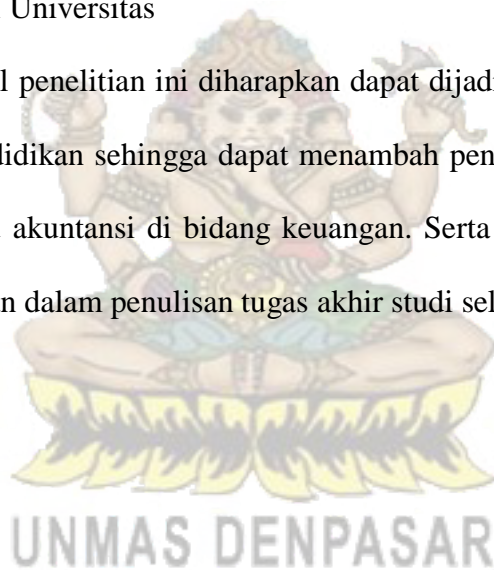
mahasiswa yang akan bekerja di kantor Pemerintahan Daerah.

b) Bagi PEMDA

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mengetahui bahwa kualitas laporan keuangan bisa berpengaruh dengan adanya penerapan sistem akuntansi keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia.

c) Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan ilmiah pendidikan sehingga dapat menambah pengetahuan terutama dalam ilmu akuntansi di bidang keuangan. Serta dapat digunakan sebagai acuan dalam penulisan tugas akhir studi selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak (agent) setuju untuk bertindak dengan persetujuan pihak yang lain (principal). Zimmerman pada tahun 1997 menyatakan bahwa agency problem terjadi pada semua organisasi, baik sektor publik maupun sektor swasta. Pada sektor swasta, agency problem terjadi antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agent. Pada sektor publik, agency problem terjadi antara pejabat yang terpilih rakyat sebagai agent dan para pemilih (masyarakat) sebagai principal. Agency problem muncul ketika prinsipal mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen, atau dalam perjanjian kontrak kerja antara prinsipal dan agen. Dalam hubungan kontrak kerja, pihak agent secara moral bertanggung jawab dalam memaksimalkan keuntungan prinsipal, namun di sisi lain agent juga berkepentingan dalam memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri (Girsang, 2015).

Menurut Meisser yang dikutip dari Girsang (2015), terdapat 2 permasalahan agensi yaitu adanya informasi asimetris dimana agen secara umum memiliki lebih banyak informasi dari prinsipal dan terjadinya konflik kepentingan akibat ketidaksamaan tujuan, di mana agen tidak selalu bertindak sesuai dengan tujuan kepentingan prinsipal. Akuntabilitas publik adalah sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Girsang, 2015). Pemerintah dalam hal ini bertanggungjawab memberikan informasi yang transparan dan akuntabel, salah satunya yaitu melalui kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan sekaligus pengungkapan dan penyajian laporan sewajar mungkin.

2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan secara rinci bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan berbagai prosedur manual maupun yang sudah terkomputerisasi mulai dari kegiatan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan serta operasional pemerintah.

Berdasarkan Halim (2004) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan suatu sistem akuntansi yang di dalamnya terdapat proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dan laporan keuangan dalam wujud melaksanakan APBD, yang dilakukan dalam berbagai prinsip akuntansi yang sudah diterima secara umum.

Berdasarkan dua sudut pandang tentang pengertian Sistem Akuntansi Daerah di atas, maka bisa disimpulkan bahwa sistem akuntansi daerah merupakan suatu serangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga laporan keuangan dalam hal pertanggungjawaban pelaksana APBD yang bisa dilakukan

secara manual atau memanfaatkan aplikasi komputer.

Diberlakukannya sistem akuntansi keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang bentuk Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 13 Tahun 2006.

Berbagai output yang akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan tersebut adalah:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Laporan Neraca
- 3) Laporan Arus Kas
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas Dana
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam sistem akuntansi keuangan daerah, terdapat tiga metode pencatatan, yaitu Single entry, Double entry dan Triple entry. Saat ini, metode pencatatan single entry sudah makin ditinggalkan walaupun ada beberapa area Pemda yang masih menggunakannya.

Hal tersebut terjadi karena metode single entry memiliki beberapa kelemahan seperti tidak mampu mencerminkan performa secara riil dan tidak mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, metode double entry diciptakan untuk menutupi kelemahan dari metode single entry.

1) Single Entry

Dari sekian banyaknya sistem pencatatan buku, salah satunya adalah pencatatan buku tunggal atau single entry. Pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan dalam sistem ini hanya dilakukan sebanyak satu

kali saja. Transaksi tersebut akan mengakibatkan adanya pemasukan kas yang akan diinput dalam kolom penerimaan, sedangkan pengurangan kas akan diinput dalam kolom pengeluaran.

Beberapa kelebihan yang ada pada sistem single entry ini adalah lebih mudah dipahami dan juga lebih sederhana. Namun, sistem ini masih kurang bagus untuk disajikan dalam bentuk laporan karena Penggunaan kesulitan dalam mencari kesalahan pembukuan dan mengontrol keuangan.

2) Double Entry

Pada prinsipnya, metode pencatatan double entry masih sama dengan metode pencatatan debit-kredit pada prinsip dasar akuntansi umum. Namun, yang membedakannya adalah rumus persamaan dasar akuntansi di ruang lingkup akuntansi keuangan daerah. Rumus persamaan dasar tersebut adalah “belanja + aset = kewajiban + ekuitas + pendapatan”.

Selain itu, pencatatan yang dilakukan dengan metode double entry juga akan memanfaatkan basis kas modifikasi. Artinya, pencatatan akuntansi hanya dilakukan pada pencatatan yang hanya berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, sedangkan pencatatan yang berasal dari luar penerimaan dan pengeluaran kas akan diinput pada basis akrual.

3) Triple Entry

Metode pencatatan Triple entry adalah metode yang dikembangkan dari Double entry. Prinsipnya pun hampir sama dengan double entry yaitu adanya tambahan pencatatan pada buku anggaran. Sederhananya, ketika pencatatan double entry sedang dilakukan, maka

metode triple entry akan melakukan pencatatan yang dilakukan oleh para PPK, SKPD, dan SKPKD.

Sistem akuntansi keuangan daerah dibentuk dengan beberapa tujuan. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing dari tujuan tersebut.

1) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sistem akuntansi pemerintah yang bisa memberikan berbagai informasi terkait keuangan secara cermat, dalam waktu dan format yang tepat, dan berguna untuk berbagai pihak yang bertanggung jawab dan memang berkaitan langsung dengan operasi unit pemerintah.

Selain itu, tujuan akuntabilitas ini akan mewajibkan pada tiap pegawai ataupun badan pengelola keuangan negara untuk harus mampu memberikan tanggung jawab dan perhitungan terhadap laporan keuangan yang telah dibuatnya.

2) Manajerial

Akuntansi daerah akan mampu memberikan beragam informasi keuangan yang dibutuhkan untuk perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta penilaian performa pemerintah.

3) Pengawasan

Akuntansi daerah harus mampu menyelenggarakan pemeriksaan oleh para aparat pengawasan fungsional secara efisien dan juga efektif.

4) Menjaga Aset

Sistem akuntansi ini dapat digunakan untuk menjaga aset K/L/PD melalui metode pencatatan, pemrosesan dan pelaporan keuangan yang

dilakukan secara konsisten sesuai dengan standar serta praktek akuntansi yang mampu diterima secara umum.

5) Penyedia Informasi Anggaran dan Keuangan

Sistem akuntansi ini juga berfungsi untuk menyediakan berbagai informasi yang akurat dan juga tepat waktu terkait anggaran dan kegiatan keuangan K/L/PD, yang selanjutnya akan berguna sebagai dasar pengukuran performa guna menentukan tingkat ketaatan pada pihak otorisasi anggaran dan demi tujuan akuntabilitas.

Selain itu, sistem akuntansi ini dapat dijadikan sebagai media untuk menyediakan informasi yang valid tentang kondisi keuangan K/L/PD secara keseluruhan, serta untuk perencanaan pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan K/L/PD secara efisien.

2.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Untuk mengetahui terminologi teknologi informasi, terlebih dahulu kita memahami pengertian teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi secara umum ialah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer terutama pada aplikasi hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak komputer). Secara sederhana, pengertian teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Sedangkan menurut Wikipedia, pengertian teknologi Informasi (IT) adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan,

dan menyebarkan informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. (Kemala, 2018).

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Triandis (1980) dalam Geovannie (2016:3) mengemukakan bahwa: “Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengetahuan seseorang di lingkungan yang dapat dipengaruhi oleh perasaan individu terhadap penggunaan komputer, faktor sosial di lingkungan tempat kerja yang menggunakan komputer, kebiasaan individu saat menggunakan komputer, konsekuensi yang dirasakan individu yang diharapkan dari penggunaan komputer, dan kondisi yang memfasilitasi dalam lingkungan kondusif yang menggunakan komputer dan alat teknologi lainnya.” Menurut Thompson et al (1991) dalam Chintya (2015:3): “Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan”.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dengan adanya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal

dan tepat waktu. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayan publik, dengan kemajuan teknologi yang pesat serta potensi pemanfaatnya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan menggunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat (Darmawan dan Darwanis, 2018).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja individu menurut Triandis (1980:28) dalam Geovannie (2016:3), yaitu:

1) Konsekuensi yang dirasakan (Perceived Consequences)

Didefinisikan sebagai hasil yang diperoleh dimasa datang, seperti peningkatan fleksibilitas, merubah pekerjaan atau peningkatan kesempatan bagi pekerjaan yang lebih berarti.

2) Faktor Sosial (Social Factors)

Diartikan sebagai internalisasi individu dari referensi kelompok budaya subyektif (norma, peran, dan nilai-nilai) dan mengkhususkan persetujuan antar pribadi bahwa individu telah berusaha dengan yang lain pada situasi sosial khusus.

3) Perasaan Individu (Affect)

Diartikan mengacu pada emosi murni, sukacita, kegembiraan, kesenangan, depresi, ketidaksukaan, ketidakpuasan, atau kebencian yang berhubungan dengan individu tertentu dalam pemanfaatan teknologi informasi.

4) Niat (Intention)

Sejauh mana seorang individu bersedia untuk mencoba dan berinovasi dalam mengerahkan pekerjaannya untuk menggunakan teknologi informasi.

5) Kebiasaan (Habit)

Menjelaskan pada perilaku yang telah menjadi otomatis dan rutin berulang-ulang dalam kegiatan individual menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja individual dalam melaksanakan tugas.

6) Kondisi yang Memfasilitasi (Facilitating Condition)

Didefinisikan sebagai faktor obyektif di dalam lingkungan yang memudahkan pemakai dalam bertindak/bekerja.

2.1.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Pengendalian intern akuntansi

Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab

antar unit organisasi.

2) Pengendalian administratif

Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

SPIP merupakan suatu langkah nyata pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sendiri memiliki tujuan untuk mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlindungan asset Negara, keterandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada perundang-undangan dan peraturan serta kebijakan yang berlaku. Menurut Hery (2016:132) manajemen memiliki tiga tujuan utama dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi serta ketaatan pada hukum dan peraturan.

Tujuan sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan yang efektif dan efisien

Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian harus dirancang agar tujuan yang ingin dicapai berjalan efektif dan efisien. Istilah efisien biasanya

dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi pemerintah efisien bila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima) dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan

Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus andal atau layak dipercaya, dengan pengertian dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah serta merugikan organisasi.

3) Pengamanan aset negara

Aset negara diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Pengamanan aset negara menjadi perhatian penting pemerintah dan masyarakat karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya. Kejadian terhadap aset tersebut dapat merugikan instansi pemerintah yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. Upaya pengamanan aset ini, antara lain dapat ditunjukkan dengan kegiatan pengendalian seperti pembatasan akses penggunaan aset, data dan informasi, penyediaan petugas keamanan, dan sebagainya.

4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum, sehingga setiap transaksi atau kegiatan yang dilaksanakan harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian, misalnya berupa tuntutan oleh aparat maupun masyarakat. Keempat tujuan sistem pengendalian intern tersebut tidak perlu dicapai secara terpisah-pisah dan tidak harus dirancang secara terpisah. Unsur-unsur pengendalian internal menurut Mulyadi (2016) adalah sebagai berikut:

1) Struktur organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka pemisahan tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melakukan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pemisahan tanggung jawab fungsional dalam pelaksanaan transaksi dilakukan untuk membagi berbagai tahapan transaksi kepada unit organisasi yang lain sehingga semua tahapan transaksi tidak diselesaikan oleh satu unit organisasi saja. Struktur organisasi yang dapat memisahkan fungsi-fungsi ini diharapkan dapat mencegah kecurangan-kecurangan dalam perusahaan.

2) Sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan

Sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan dalam suatu perusahaan merupakan suatu alat bagi manajemen untuk mengadakan pengawasan terhadap operasi dan transaksi yang terjadi.

3) Praktik yang sehat

Setiap pegawai di dalam suatu perusahaan melakukan tugasnya

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jika penyusunan struktur organisasi dan perancangan arus prosedur merupakan suatu rencana yang strategis maka diperlukan adanya praktik- praktik yang sehat yang merupakan alat taktis untuk tercapainya suatu rencana.

4) Karyawan yang cakap

Karyawan yang cakap merupakan salah satu unsur sistem pengendalian intern yang paling penting bagi perusahaan karena keberhasilan perusahaan secara keseluruhan tergantung pada prestasi dan sikap karyawan. Untuk itu, penyeleksian terhadap karyawan harus benar-benar dilaksanakan supaya mendapatkan karyawan yang berkualitas dan bisa berprestasi, yaitu melalui prosedur pengujian yang ketat, pengukuran prestasi atas tanggung jawab yang diberikan serta pendidikan dan pelatihan.

2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pengertian dan arti kompetensi oleh Spencer dapat didefinisikan sebagai karakteristik yang mendasari seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang diajukan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu (A competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion referenced effective and or superior performance in a job or situation). Berdasarkan dari arti definisi kompetensi ini, maka banyak mengandung beberapa makna diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Karakteristik dasar (underlying characteristic) kompetensi adalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang serta mempunyai perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan tugas pekerjaan.
- 2) Hubungan kausal (causally related) berarti kompetensi dapat menyebabkan atau digunakan untuk memprediksikan kinerja seseorang artinya jika mempunyai kompetensi yang tinggi maka akan mempunyai kinerja tinggi pula (sebagai akibat).
- 3) Kriteria (criterion referenced) yang diajukan sebagai acuan, bahwa kompetensi secara nyata akan memprediksi seseorang dapat bekerja dengan baik, harus terukur dan spesifik atau terstandar, misalnya kriteria volume penjualan yang mampu dihasilkan seorang salesman sebesar 1.000 buah/bulan atau manajer keuangan dapat mendapatkan keuntungan 1 miliar/tahun.

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting dan sebagai unggulan bidang tersebut.

Spencer menyatakan bahwa kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang dan mengindikasikan cara berperilaku atau berfikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu cukup lama. Terdapat lima tipe karakteristik kompetensi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan.
- 2) Sifat adalah karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi.
- 3) Konsep diri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang.
- 4) Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik.
- 5) Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten adalah keharusan bagi perusahaan. Mengelola sumber daya manusia berdasarkan kompetensi diyakini bisa lebih menjamin keberhasilan mencapai tujuan. Sebagian besar perusahaan memakai kompetensi sebagai dasar dalam memilih orang, mengelola kinerja, pelatihan dan pengembangan serta pemberian kompensasi.

Proses rekrutmen dan seleksi diarahkan untuk mencari orang yang mendekati kompetensinya, demikian pula halnya untuk pengembangan kinerja dan karir karyawan. Setiap kali diadakan uji kompetensi (assessment) untuk mencocokkan apakah karyawan bisa memenuhi model kompetensinya atau tidak. Bila terjadi kekurangan maka karyawan tersebut harus dilatih dan dibina lebih lanjut. Kelalaian atau mengabaikan pelatihan bisa berakibat karyawan menjadi tidak kompeten sehingga kinerja tidak maksimal.

Menurut Mangkunegara, kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara

langsung terhadap kinerjanya. Kompetensi sumber daya manusia menurut hasil kajian Perrin yaitu :

- 1) Memiliki kemampuan komputer (Eksekutif Lini)
- 2) Memiliki pengetahuan yang luas tentang visi
- 3) Memiliki kemampuan mengantisipasi pengaruh perubahan
- 4) Memiliki kemampuan memberikan pendidikan tentang sumber daya manusia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tiga hal pokok dalam kompetensi SDM adalah:

- 1) Pengetahuan (Knowledge), merupakan penguasaan ilmu dan teknologi yang dimiliki seseorang, dan diperoleh melalui proses pembelajaran serta pengalaman selama kehidupannya. Indikator pengetahuan (knowledge) dalam hal ini adalah pengetahuan manajemen bisnis, pengetahuan produk atau jasa, pengetahuan tentang konsumen, promosi dan strategi pemasaran.
- 2) Keterampilan (Skill), adalah kapasitas khusus untuk memanipulasi suatu objek secara fisik. Indikator keterampilan meliputi keterampilan produksi, berkomunikasi, kerjasama dan organisasi, pengawasan, keuangan, administrasi dan akuntansi.
- 3) Kemampuan (Ability), adalah kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Indikator kemampuan meliputi kemampuan mengelola bisnis, mengambil

keputusan, memimpin, mengendalikan, berinovasi, situasi dan perubahan lingkungan bisnis.

Dalam setiap individu seseorang terdapat beberapa karakteristik kompetensi dasar, yang terdiri atas berikut ini:

- 1) Watak (traits), yaitu yang membuat seseorang mempunyai sikap perilaku atau bagaimanakah orang tersebut merespon sesuatu dengan cara tertentu, misalnya percaya diri (self-confidence), kontrol diri (self-control), ketabahan atau daya tahan (hardiness).
- 2) Motif (motive), yaitu sesuatu yang diinginkan seseorang atau secara konsisten dipikirkan dan diinginkan yang mengakibatkan suatu tindakan atau dasar dari dalam yang bersangkutan untuk melakukan suatu tindakan.
- 3) Bawaan (self-concept), yaitu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.
- 4) Pengetahuan (knowledge), yaitu informasi yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu dan pada area tertentu.
- 5) Keterampilan atau keahlian (skill), yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental.

Michael Zwell memberikan lima kategori kompetensi, yang terdiri :

- a) Task achievement merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan task achievement ditunjukkan oleh: orientasi pada hasil, mengelola kinerja, memengaruhi, inisiatif, efisiensi produksi, fleksibilitas, inovasi, peduli pada kualitas, perbaikan berkelanjutan, dan keahlian teknis.
- b) Relationship merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan

memuaskan kebutuhannya. Kompetensi berhubungan dengan relationship meliputi: kerja sama, orientasi pada pelayanan, kepedulian antar pribadi, kecerdasan organisasional, membangun hubungan, penyelesaian konflik, perhatian pada komunikasi dan sensitivitas lintas budaya.

- c) Personal attribute merupakan kompetensi intrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar, dan berkembang. Personal attribute merupakan kompetensi yang meliputi: integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas keputusan, manajemen stress, berpikir analitis, dan berpikir konseptual.
- d) Managerial merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan dan mengembangkan orang. Kompetensi manajerial berupa: memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan orang lain.
- e) Leadership merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. Kompetensi berkenaan dengan leadership meliputi: kepemimpinan visioner, berpikir strategis, orientasi kewirausahaan, manajemen perubahan, membangun komitmen organisasional, membangun fokus dan maksud, dasar-dasar, dan nilai-nilai.

2.1.6 Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintah daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten atau kota diatur UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber- sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang- undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan, antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah

sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut, mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada di daerah dan danaperimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/ bupati/ walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa kepala daerah (gubernur/ bupati/ walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004, sumber

pendapatan daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- 2) Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- 3) Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan

(Handayani, 2016) menjelaskan bahwa kualitas pelaporan yang tinggi maka akan dapat mengurangi asimetri informasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi investasi dalam sebuah perusahaan. Sementara itu, analyst following juga berperan penting sebagai pihak yang melakukan monitoring di luar perusahaan dan juga mampu menurunkan asimetri informasi serta dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan adanya analyst following, pentingnya kualitas pelaporan keuangan akan meningkat karena analyst following adalah salah satu pemakai laporan keuangan (investor, karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah, pelanggan, masyarakat) untuk kemudian dianalisis agar dapat menghasilkan penilaian dan proyeksi seperti

perkiraan keuntungan per lembar saham di masa yang akan datang untuk suatu perusahaan. Dengan demikian, analyst following akan dapat mendorong sebuah perusahaan supaya lebih transparan dalam mengungkapkan informasi-informasi terutama yang telah disajikan dalam laporan keuangan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni:

1) Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :

a) Manfaat umpan balik (feedback value).

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Manfaat prediktif (predictive value).

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu (timelines)

Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Informasi akuntansi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila :

a) Dapat diuji kebenarannya (verifiable)

Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.

b) Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c) Penyajian secara wajar/jujur (representational faithfulness)

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data tersebut. Informasi yang disajikan harus

bebas dari unsur bias.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.2 Penelitian Sebelumnya

- 1) Aida (2019) menggunakan 3 (tiga) variabel bebas (independen) yaitu pengaruh sistem pengendalian intern, sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan serta satu variabel terikat (dependen) yaitu kualitas laporan keuangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap laporan keuangan.
- 2) Chalili (2019) menggunakan 3 (tiga) variabel bebas (independen) yaitu pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal serta satu variabel terikat (dependen) yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

- 3) Darmawan dan Darwanis (2018) menggunakan 4 (empat) variabel bebas (independen) yaitu pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem akuntansi keuangan serta satu variabel terikat (dependen) yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui hasil angket. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- 4) Dewi (2015) menggunakan 4 (empat) variabel bebas (independen) yaitu pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, pengalaman kerja dan peran audit internal serta satu variabel terikat (dependen) yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan teknik judgement sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, pengalaman kerja dan peran

audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penggunaan sistem informasi akuntansi mempermudah akses data dan informasi serta didukung dengan pemahaman akuntansi dan pengalaman kerja yang dimiliki sumber daya manusia sebagai pelaksana kerja mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas juga dipengaruhi oleh peran audit internal dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan.

- 5) Garung (2018) menggunakan 3 (tiga) variabel bebas (independen) yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem akuntansi keuangan daerah serta satu variabel terikat (dependen) yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, begitu juga dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sementara pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- 6) Kamusi (2019) menggunakan 3 (tiga) variabel bebas (independen) yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian internal serta satu variabel terikat (dependen) yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS Statistic 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan daerah. Sementara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

- 7) Kiranayanti (2016) membuktikan hubungan 3 (tiga) variabel bebas (independen) yaitu sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemahaman basis akrual dengan 1 (satu) variabel terikat (dependen) yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan hasil analisis menunjukkan bahwa sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemahaman basis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sumber daya manusia dalam perusahaan adalah pemimpin serta karyawan yang melaksanakan aktivitas perusahaan, kemampuan karyawan dalam menyelesaikan tugas menunjukkan kualitas sumber daya manusia tersebut. Penerapan sistem pengendalian intern yang baik serta pemahaman basis akrual menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
- 8) Ningrum (2018) menggunakan 3 (tiga) variabel bebas (independen) yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern serta satu variabel terikat (dependen) yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik penarikan sampel penelitian ini yang digunakan adalah purposive sampling dengan alat analisis data menggunakan SPSS Statistic 23.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan sistem pengendalian intern

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

- 9) Sari (2020) menggunakan 4 (empat) variabel bebas (independen) yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan penerapan standar akuntansi pemerintah serta satu variabel terikat (dependen) yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik penarikan sampel penelitian ini yang digunakan adalah propotional sampling dengan alat analisis data menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan penerapan standar akuntansi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- 10) Setiawan (2017) menjelaskan hubungan 3 (tiga) variabel bebas (independen) yaitu akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian intern, dan motivasi kerja dengan satu variabel terikat (dependen) yaitu kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan hasil analisis menunjukkan bahwa akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian intern dan motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan sistem pengendalian intern yang baik dengan pemahaman atas akuntansi berbasis akrual yang didukung motivasi kerja menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.